

RESILIENSI SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA DI TENGAH BERLANJUTNYA KETIDAKPASTIAN GLOBAL



“Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga dengan permodalan dan likuiditas yang baik, sehingga mampu berdaya tahan dalam menghadapi gejolak global”

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

GLOBAL



Sumber potensi kerentanan utama bagi stabilitas sektor keuangan global meliputi eskalasi tensi geopolitik, permasalahan perbankan AS, dan tingkat inflasi global yang masih tinggi.



Langkah cepat otoritas perbankan di AS dan Eropa diharapkan dapat meredam penularan tekanan lebih lanjut secara global.



Beberapa indikator sektor riil AS bergerak melemah.



Pengetatan kebijakan moneter oleh Bank sentral utama global berlanjut.

DOMESTIK



Ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% yoy di triwulan I 2023 (Triwulan IV 2022: 5,01%).



Inflasi menurun dan terkendali saat Ramadan dan Hari Raya.



Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur nasional naik menjadi 52,7.



Neraca perdagangan Indonesia di Maret 2023 mencatatkan surplus.

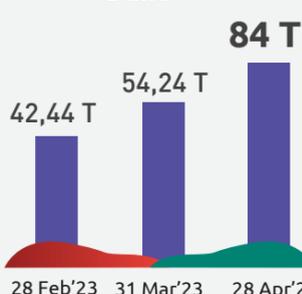
PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasar Modal

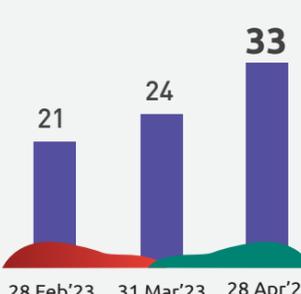
IHSG
6.915,72
28 Apr'23

Jumlah Investor
10,88 Juta
28 Apr'23

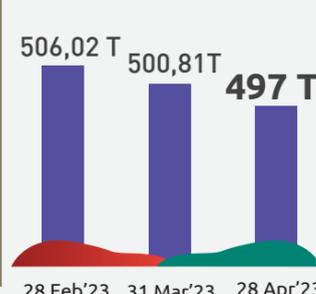
Nilai Penghimpunan Dana



Emiten Baru



NAB Reksa Dana



Securities Crowdfunding (SCF) sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM

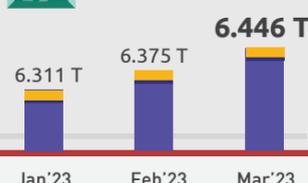
16 penyelenggara berizin OJK 383 penerbit 147.142 pemodal

Rp828,58 miliar total dana yang dihimpun

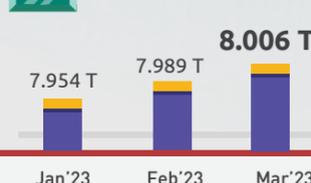
per 28 April 2023

Perbankan

Kredit Perbankan
9,93% yoy



Dana Pihak Ketiga
7% yoy



Kredit Investasi
11,40% yoy



Kredit Modal Kerja
9,52% yoy



Kredit Konsumsi
9,20% yoy



CAR
24,69%
Mar'23

AL/DPK
28,91%
Mar'23

AL/NCD
128,87%
Mar'23

NPL Gross
2,49%
Mar'23

NIM
4,77%
Mar'23

RoA
2,77%
Mar'23

Kredit restrukturisasi Covid-19 terus menurun

Nominal Kredit

Feb'23 427,7 T
Mar'23 405,42 T

Jumlah Debitur

Feb'23 1,93 juta nasabah
Mar'23 1,83 juta nasabah

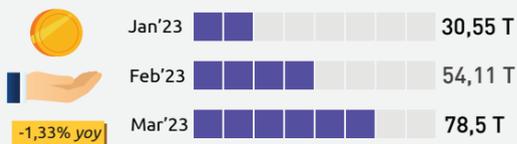
RESILIENSI SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA DI TENGAH BERLANJUTNYA KETIDAKPASTIAN GLOBAL



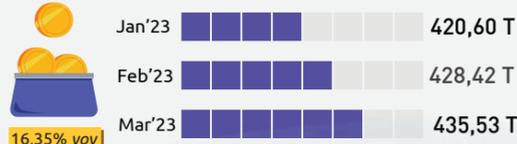
PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Industri Keuangan Non-Bank

Pendapatan Premi Asuransi



Piutang Pembiayaan



315,79%



460,06%



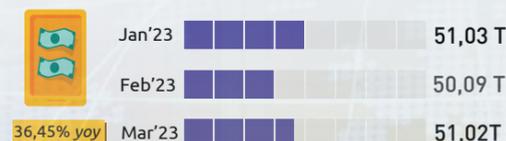
2,11x



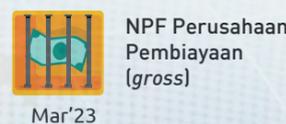
Aset Dana Pensiun



Fintech P2P Lending



2,37%



2,81%



PERKEMBANGAN EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Satgas Waspada Investasi (SWI) menghentikan kegiatan

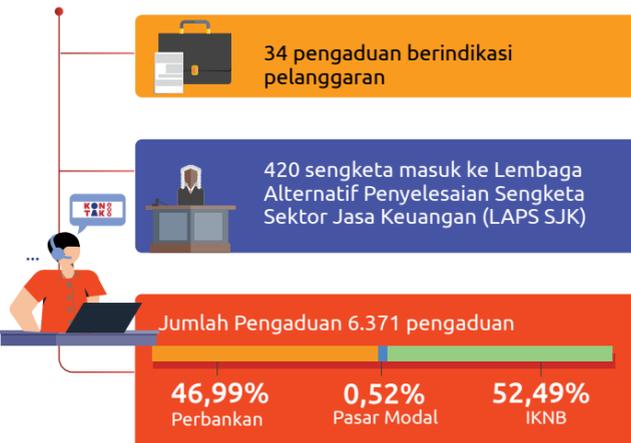
15 entitas investasi ilegal

155 platform pinjol ilegal



(Data sampai 30 April 2023)

94.737 layanan (Januari s.d 30 April 2023)



Program literasi dan edukasi keuangan secara masif:



Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)



ARAH KEBIJAKAN OJK

OJK mewaspadaai kondisi ketidakpastian global yang tinggi dan dampak rambatannya pada sektor jasa keuangan nasional. Meskipun saat ini dampak rambatannya ke domestik masih relatif terbatas namun diperlukan langkah-langkah antisipatif untuk memitigasi dampaknya ke pertumbuhan ekonomi, intermediasi dan stabilitas sistem keuangan.



- Meminta bank umum untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan penerapan manajemen risiko:
 - Memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola khususnya terkait dengan aktivitas pengelolaan portofolio aset produktif dan pendanaan;
 - Mengkaji dan mengkinikan *recovery plan*;
 - Meningkatkan fungsi maupun peran *Asset & Liability Committee*;
 - Melakukan pemantauan termasuk risiko konsentrasi pada pinjaman dan pendanaan;
 - Memperkuat penerapan program APU & PPT.
- Melakukan penyempurnaan regulasi mengenai penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit untuk memperkuat pengelolaan risiko dan kinerja *underwriting*.
- Menerbitkan ketentuan terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi (POJK Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2023).
Meminta Perusahaan Pembiayaan untuk menjaga pemenuhan ketentuan ekuitas minimum sebagai *buffer* dan melakukan *stress test*
- dan *sensitivity analysis* secara berkala di tengah ketidakpastian perekonomian global.

RESILIENSI SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA DI TENGAH BERLANJUTNYA KETIDAKPASTIAN GLOBAL



ARAH KEBIJAKAN OJK

Kebijakan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen

1. Mengakselerasi *enforcement* pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan antara lain melalui akselerasi implementasi program pemeriksaan tematik perjanjian baku dan validasi laporan penilaian sendiri pelaku usaha jasa keuangan.
2. Mengakselerasi respon penanganan terhadap pengaduan konsumen dan masyarakat.
3. Meningkatkan harmonisasi proses penyusunan dan penyesuaian beberapa kebijakan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen sebagai tindak lanjut atas amanat UU P2SK, dengan memperhatikan prinsip *striking the right balance* antara kepentingan konsumen dan masyarakat dengan stabilitas industri jasa keuangan.
4. Meningkatkan sinergi antara OJK dengan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum perlindungan konsumen dan masyarakat.
5. Melakukan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Ekosistem Keuangan Inklusif di wilayah perdesaan, yang diharapkan dapat mengurangi *gap* literasi dan inklusi keuangan antara masyarakat perdesaan dan perkotaan.
6. Mendorong peningkatan inklusivitas keuangan syariah di daerah melalui berbagai program TPAKD dimana salah satu fokus TPAKD pada tahun 2023 adalah program *business matching* penyaluran pembiayaan yang mendukung akselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan syariah.
7. Memperkuat sinergi pengembangan inklusi keuangan syariah dengan pemangku kepentingan seperti KNEKS, MES dan IAEI.

Kebijakan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan Infrastruktur Pasar

1. Menerbitkan penyempurnaan ketentuan tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK Nomor 4 tahun 2023).
2. Akan merilis ketentuan terkait Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) yang diharapkan dapat meningkatkan integritas data pasar modal.

Penguatan Tata Kelola OJK

1. Sinergi dengan Indonesia *Risk Management Association* (IRMAPA) memperkuat kapasitas profesi manajemen risiko di industri jasa keuangan.
2. Menjadi salah satu Tim Pelaksana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).
3. Mengintensifkan proses transformasi internal khususnya terkait pengawasan, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, pengaturan, dan perlindungan konsumen.
4. Mematangkan perbaikan di sisi struktur organisasi, proses bisnis, maupun sistem informasi dengan berfokus kepada pelayanan perizinan, dan juga pengelolaan data terintegrasi.
5. Melakukan asesmen untuk menyempurnakan proses bisnis penegakan hukum di lingkungan SJK untuk memastikan integritas sistem keuangan sejalan amanah UU P2SK.

Kebijakan Penanganan LJK Dalam Perhatian Khusus

1. 101 Perkara diselesaikan oleh Penyidik OJK (dari 2014 s.d April 2023):



79 perkara Perbankan



5 perkara Pasar Modal



17 perkara IKNB

2. 89 perkara telah diputus oleh pengadilan:



71 perkara in kracht



2 perkara banding



16 perkara kasasi

OJK senantiasa memonitor erat dinamika global maupun domestik yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Sinergi dengan KSSK juga terus diperkuat untuk mengantisipasi dampak risiko makroekonomi dan mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga daya tahan sektor jasa keuangan sehingga mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi ketidakpastian.